

MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

TOLAK REKLAMASI: Massa ForBALI menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Bali, Sabtu kemarin (24/10).

ForBALI Gelar Parade Budaya

Tetap Tolak Reklamasi Teluk Benoa

DENPASAR - Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) kembali turun ke jalan dengan menggelar Parade Budaya bersama segenap lapisan masyarakat baik di Desa Adat, Banjar, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, *Sekaa Truna Truni*, Lembaga Swadaya Masyarakat, Mahasiswa, Seniman dan individu - individu lainnya. Berkumpul di

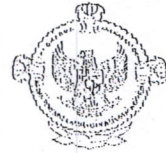
Parkir timur lapangan Renon, Pada Sabtu kemarin, (24/10), sekitar pukul 14.00, ratusan masyarakat tersebut berkumpul dengan atribut aksi untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Aksi di depan Kantor Gubernur Bali kali ini diisi oleh berbagai orasi yang dilakukan dari berbagai elemen masyarakat tersebut, salah satunya I Putu Hindu Iswara, mahasiswa Hindu Indonesia ■

► Baca ForBALI... Hal 31

Edisi : Minggu, 25 Oktober 2015

Hal. : 21



Sambungan - - -

Baliho Dirusak, FPK Bikin Lagi

■ FORBALI...

Sambungan dari hal 21

Ia mengungkapkan, Pihak pemerintah masih bisu dan mengabaikan aspirasi masyarakat. "Sudah tiga tahun kami di jalanan, pemerintah masih saja tidak menghiraukan, padahal sudah jelas-jelas sebagian besar masyarakat Bali sudah secara tegas menolak rencana reklamasi teluk benoa tersebut," tegasnya dalam orasinya tersebut.

Sementara itu, hal menarik lainnya, ada orasi yang dilakukan oleh putra dari ketua Parasparos, Ir. Agung Suryawan Wiranatha yang surat penolakan rencana reklamasi dipalsukan oleh orang yang tak bertanggung jawab dan dikirim ke Presiden Joko Widodo. "Saya sangat kecewa, surat ayah saya atas mengenai reklamasi Teluk Benoa dipalsukan tanda tangan dan dirubah isinya oleh orang yang tak bertanggung jawab," terangnya saat berorasi.

Sementara itu, Humas Aksi ForBALI, Suriadi Darmoko mengungkapkan masih saja dilakukan upaya pemaksaan untuk mereklamasi Teluk Benoa oleh DPRD Provinsi Bali bahkan Panitia Khusus Arah Zonasi (Pansus APZ) menyatakan akan melakukan revisi terhadap perda RTRWP nomor 16 tahun 2009.

"Bukannya mempertahankan produk legislasinya, DPRD Bali justru tunduk dengan Perpres 51 tahun 2014 yang dalam proses penerbitannya bermasalah," ungkap Darmoko

kepada koran ini.

Dalam aksinya tersebut, ForBALI mendesak DPRD Provinsi Bali untuk menghentikan upaya-upaya untuk memuluskan reklamasi teluk benoa dan menghentikan upaya perubahan perda 16 tahun 2009, serta menolak rencana reklamasi teluk benoa. ForBALI juga menuntut komitmen Presiden Joko Widodo, untuk bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim dengan membatalkan Perpres 51 Tahun 2014 tentang perubahan peraturan presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita.

Sementara itu, perjuangan warga Kelan, Kuta Selatan, Badung untuk terus menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tak pernah berhenti. Bahkan, pasca terjadi perusakan terhadap baliho, kemarin (24/10) warga melalui Forum Pemuda Kelan (FPK) kembali mendirikan baliho di pertigaan Bypass Desa Adat Kelan.

Warga kembali memasang baliho berukuran tiga kali lima meter bertuliskan "Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi Teluk Benoa", "Batalkan Perpres 51 Tahun 2014", "Lawan atau Tenggelam". Ketua FPK, I Kadek Buda Warsa Dwi Sanjaya saat dikonfirmasi menyatakan, pendirian baliho Tolak reklamasi itu merupakan bentuk konsistensi penolakan masyarakat Desa Adat Kelan atas rencana reklamasi Teluk Benoa. "Apa pun rintangannya, langkah kami tidak akan surut untuk menolak reklamasi Teluk Benoa" paparnya. (ara/pr/yes)